



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00120/2024
Lampiran : 1 Halaman

12 Februari 2024

Kepada Yth.

**Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPSU atas Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I
Tahun 2020**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Sukuk ("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang diselenggarakan pada **31 Januari 2024**. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Hasil RUPSU atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Kontan dan *website* Perseroan pada hari Senin, 12 Februari 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

PLTU Adipala melakukan cofiring dengan limbah serbuk kayu dan limbah uang kertas.

Wanhar, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

■ ENERGI

Kejar Bauran EBT, PLN Power Genjot Cofiring PLTU

JAKARTA. PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menargetkan peningkatan implementasi cofiring biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT).

Salah satu PLTU yang telah mengadopsi pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar pengganti batubara adalah PLTU Adipala di Cilacap, Jawa Tengah. PLTU ini memanfaatkan berbagai limbah dari kayu hingga uang kertas.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar mengatakan, dalam menerapkan cofiring, PLTU Adipala telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan berbagai sumber biomassa, mulai dari kayu hasil serbuk gergaji hingga limbah rakic uang kertas (LURK).

"Saat ini, PLTU Adipala sudah melakukan program cofiring dengan menggunakan limbah limbah, baik dari gergajian kayu maupun limbah uang kertas, ini menarik," jelas Wanhar, Sabtu (10/2).

Menurut Wanhar, pemanfaatan LURK merupakan terobosan terbaru dan pasokannya terjamin. Sebab, berdasarkan data Bank Indonesia, dalam satu tahun ada 6.000



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT).

ton limbah rakic uang kertas.

"Cofiring dengan limbah uang kertas ini pertama kali, ini menarik sebagaimana karena akan selalu ada. Kalau penjelasan BI ini cukup sustain, karena ada 6.000 ton per tahun," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLN Indonesia Power terus mengejar target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025. Salah satunya melalui program cofiring, termasuk di PLTU Adipala.

Saat ini, PLTU Adipala terus

menaikkan target tonase dan kWh green untuk cofiring hingga 5%. Maka itu, diperlukan tambahan material bahan bakar dari berbagai jenis biomassa. "Salah satunya pemanfaatan LURK, dan ini cukup berhasil," ujarnya.

Nilai kalor LURK cukup tinggi, yaitu 3.901 kCal/kg (ar) jika dibandingkan biomassa saudust yang sekitar 2.500 kCal/kg (ar). Sehingga, dalam setahun dapat dihasilkan energi sebesar 21.679.027,3 MCal atau 25.201,9 MWh.

Saat ini, PLTU Adipala terus

Filemon Agung

Minyakita Gerogoti Minyak Non-Subsidi

Masyarakat beralih dari minyak kemasan premium ke Minyakita yang murah

Rashif Usman

JAKARTA. Produksi minyak goreng kemasan sederhana dengan merek Minyakita tahun ini diprediksi meningkat. Potensi kenaikan permintaan Minyakita ini seiring dengan laju kenaikan permintaan terhadap minyak goreng.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksi, penjualan Minyakita dan minyak goreng curah tahun 2024 ini akan mencapai 2,78 juta ton. Jumlah ini naik dibandingkan penjualan tahun 2023 lalu yang berkisar 2,75 juta ton.

Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga menyampaikan, sejak dirilis tahun 2022, tren penjualan Minyakita dan minyak goreng curah memang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 lalu, penjualan sempat menyentuh angka 3 juta ton. Namun, penjualannya di tahun lalu turun sebesar 8,3% menjadi 2,75 juta ton.

Penurunan penjualan minyak goreng bersubsidi ini berbanding lurus dengan pe-

urunan permintaan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebutuhan minyak goreng tahun 2022 lalu mencapai 5,9 juta ton. Namun, permintaan menurun menjadi 4,8 juta ton di tahun 2023.

Sahat mengungkapkan, adanya perubahan pola makan masyarakat membuat volume konsumsi minyak goreng menjadi tidak menentu. Ia menilai, sebagian masyarakat kini mulai mengurangi konsumsi makanan dengan cara digoreng (*fried foods*). "Pola makan masyarakat kota sudah banyak berubah, goreng-goreng sudah mulai berkurang," kata Sahat kepada KONTAN, Minggu (11/2).

Alhasil, bukan cuma Minyakita dan minyak goreng curah yang penjualannya tergerus di tahun lalu, tapi juga minyak goreng kemasan premium. Mengacu data BPS yang mencatat konsumsi masyarakat sebanyak 4,8 juta ton, kontribusi minyak goreng curah dan Minyakita mencapai 2,75 juta ton. Artinya, penjualan minyak goreng kema-

san premium tahun lalu hanya 2,05 juta ton. Padahal, di tahun sebelumnya bisa mencapai 2,9 juta ton.

Beralih ke Minyakita

Selain dipengaruhi pola makan masyarakat yang berubah, menurunnya permintaan minyak goreng kemasan premium juga dikarenakan banyak masyarakat yang beralih ke Minyakita. Maklumlah harganya jauh lebih murah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 41/2022, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita ditetapkan Rp 14.000

per liter. Adapun HET minyak goreng curah ditetapkan Rp 15.500 per kg, Sementara harga rata-rata minyak goreng kemasan premium dibanderol di atas Rp 20.000 per liter. "Sehingga, banyak masyarakat sekarang lebih memilih Minyakita," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono menjamin pasokan bahan baku minyak goreng di dalam negeri terpenuhi. Maka itu, ia meminta pemerintah mencabut kebijakan wajib pasok lokal atau *domestic market obligation* (DMO) CPO tahun ini. ■

Profil Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia Tahun 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| ■ Kapasitas Produksi Terpasang: | 42,36 juta kilo liter |
| ■ Total Produksi: | 22,40 juta kilo liter (curah dan kemasan) |
| ■ Volume Ekspor: | 13,13 juta kilo liter |
| ■ Volume Lokal: | 9,27 juta kilo liter |
| ■ Kebutuhan Domestik: | 6,09 juta kilo liter |
| ■ Jumlah Pelaku Usaha: | 104 Pabrik dan 137 Pengemas/Repacker |
| ■ Harga Jual Rata-rata: | Rp 20.696 per liter |

Sumber: GIMNI dan Riset KONTAN

Truk Tangki BBM



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Pengisian stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Kebon Jeruk, Jakarta, Minggu (11/2). Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Badan Usaha untuk menjaga keandalan pasokan dan distribusi BBM menjelang gelaran Pemilihan Umum 2024, serta datangnya bulan Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.

Gerai

Kemperin Siapkan Strategi Genjot Industri Manufaktur

JAKARTA. Kinerja industri pengolahan atau industri manufaktur tampil cukup gemilang sepanjang tahun 2023 lalu. Sektor ini mencatatkan kinerja yang impresif dan memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor manufaktur tumbuh 4,64% dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 18,67% pada tahun lalu.

"Industri pengolahan tetap tumbuh dan berhasil lepas dari krisis yang terjadi pada 2023," kata Agus Gumilwan Kartasasmita, Menteri Perindustrian, Sabtu (10/2).

Kinerja positif ini sejalan dengan Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia pada kuartal IV-2023 yang mencapai 51,20%, atau masih berada di zona ekspansi. Selain itu, kapasitas produksi terpakai pada periode yang sama mencapai 73,91% atau meningkat dibandingkan kuartal IV-2022 yang sebesar 71,49%. Ini menandakan industri pengolahan masih menunjukkan peningkatan aktivitas produksi.

Dengan performa tersebut, industri pengolahan pada periode itu menjadi sumber pertumbuhan tertinggi bagi perekonomian Indonesia, yakni sebesar 0,85%. Industri pengolahan juga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sepanjang 2023, yakni sebesar 0,95%.

Menurut Agus, capaian kinerja ini cukup memuaskan di tengah lesunya perdagangan di tingkat global. "Industri manufaktur masih tumbuh stabil lantaran ditopang permintaan di pasar domestik yang masih cukup tinggi," ujarnya.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB di tahun ini ditargetkan bisa lebih tinggi lagi. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Perindustrian menjalankan program prioritas tahun ini. Sejumlah program itu antara lain restrukturisasi mesin pabrik, serta melanjutkan hilirisasi sumber daya alam di tiga sektor. Yakni, industri agro, industri bahan tambang dan mineral, serta industri migas dan batubara.

Dimas Andi Sadewo

Jumlah Penumpang Harian MRT Jakarta Meningkat

JAKARTA. Layanan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta mencatatkan kenaikan rata-rata jumlah penumpang. Manajemen MRT mencatat, sepanjang Januari 2024 MRT telah melayani sekitar 3,16 juta penumpang, dengan rata-rata jumlah penumpang mencapai 102.041 orang per hari.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo menyampaikan, angka tersebut mengalami kenaikan dari rata-rata jumlah penumpang bulan sebelumnya, yaitu 98.341 orang per hari. Ketepatan waktu tempuh, kedatangan, dan berhentinya moda transportasi ini juga konsisten di angka 99,9%.

"Saat hari kerja Senin sampai Jumat, rata-rata 116.340 orang menggunakan layanan MRT Jakarta. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan MRT Jakarta, juga kepada mitra pengumpan sehingga lebih banyak orang yang menggunakan MRT Jakarta dalam mobilitas sehari-harinya," ujarnya, akhir pekan lalu.

Untuk menaikkan jumlah penumpang, MRT Jakarta menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah menyiapkan promo tiket di sejumlah tempat wisata. Kerja kolaborasi dengan sejumlah operator transportasi publik pengumpan (*feeder*) juga mendorong peningkatan angka keterangkutan. Terlebih banyak moda pengumpan mengangkut dari kawasan hunian langsung menuju stasiun terdekat.

Terbaru, MRT Jakarta bekerja sama dengan Damri dalam penyediaan layanan bus pengumpan dari PIK 2 menuju Stasiun Blok M BCA. Selain berdampak terhadap kenaikan angka keterangkutan, kehadiran angkutan pengumpan ini juga mendorong kebiasaan masyarakat untuk menggunakan platform berbagi kendaraan (*ride sharing*).

MRT mencatat, operator pengumpan ini menyumbang sekitar 23% angka keterangkutan dari total *ridership* MRT Jakarta. Tingginya angka keterangkutan ini juga tidak lepas dari waktu operasional MRT Jakarta yang dimulai pukul 05.00 WIB.

Amalia Nur Fitri

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("RUPSU") pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, bertempat di Wika Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17, Jl. D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, Indonesia, yang telah dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("Pemegang Sukuk") dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("Sukuk") yang bernilai pokok sebesar Rp453.350.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 453.350.000.000 (empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta) suara yang merupakan 90,67% (sembilan puluh koma enam puluh persen) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

Dalam Agenda RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- Untuk usulan Keputusan Alternatif 1 yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, yaitu :
 - I. Menerima penjelasan dan menyetujui usulan sehubungan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali atas Dana Sukuk;
 - II. Menerima penjelasan dan menyetujui untuk memberikan kelonggaran waktu atau perbaikan atas kondisi kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk paling lambat sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
 - III. Apabila Perseroan tidak memperbaiki/menghilangkan kondisi kelalaian tersebut, maka Wali Amanat akan melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan Perjanjian Perwalianan dan perubahan-perubahannya.

Adapun hasil Keputusan untuk Alternatif 1 yaitu:

- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang abstain tidak ada.
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tidak setuju sebanyak 147.000.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau 32,43% (tiga puluh dua koma empat tiga persen).
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang setuju sebanyak 306.350.000.000 (tiga ratus enam miliar tiga ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp306.350.000.000,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau 67,57% (enam puluh tujuh koma lima puluh persen).

- Untuk usulan Keputusan Alternatif 2 yang disampaikan atau dipaparkan kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, yaitu :

- I. Pemegang Sukuk tidak menerima penjelasan dan tidak menyetujui usulan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk;
- II. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk yang tidak menerima penjelasan dan tidak menyetujui usulan sehubungan adanya kelalaian Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk, maka sesuai ketentuan Perjanjian Perwalianan memutuskan :
 - Wali Amanat untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang paling lambat 5 Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan RUPSU yaitu tanggal 31 Januari 2024.
 - Pemegang Sukuk meminta Perseroan untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran seluruh Jumlah Kewajiban Sukuk ditambah Pendapatan Bagi Hasil yang belum dibayar oleh Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 60 / 90 / 120 Hari Kalender terhitung sejak tanggal penagihan Jumlah Terhutang oleh Wali Amanat.
 - Apabila dalam jangka waktu pating lambat 60 / 90 / 120 Hari Kalender terhitung sejak tanggal penagihan Jumlah Terhutang oleh Wali Amanat, Perseroan belum dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran seluruh Jumlah Kewajiban Sukuk, maka Wali Amanat wajib segera melaksanakan tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan atau Pemegang Sukuk memutuskan agar Wali Amanat melaksanakan kembali RUPSU untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Adapun hasil Keputusan untuk Alternatif 2 yaitu:

- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang abstain tidak ada.
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tidak setuju sebanyak 306.350.000.000 (tiga ratus enam miliar tiga ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp306.350.000.000,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau 67,57% (enam puluh tujuh koma lima puluh persen).
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang setuju sebanyak 147.000.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau 32,43% (tiga puluh dua koma empat tiga persen).

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 6 huruf a Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dimana keputusan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 12 Februari 2024



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK



PT BANK MEGA TBK